

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KESMIKINAN DI KECAMATAN JAMBANGAN KOTA SURABAYA

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM AS AN EFFORT TO REDUCE POVERTY IN THE THE JAMBANGAN SUB- DISTRICT, SURABAYA CITY

Muhammad Febi Fauzan¹, Prasetyo Isbandono²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: 1muhammadfebi.19064@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: 2prasetyoisbandono@unesa.ac.id

Abstrak

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan bersyarat yang memiliki tujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, Program Keluarga Harapan telah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2007. Namun, implementasi Program Keluarga Harapan masih memiliki kendala dan belum terlaksana secara optimal. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini untuk meneliti implementasi atas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh George Edward III. Teknik pengambilan sampel menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi yang dilaksanakan di Kecamatan belum terlaksana dengan optimal dalam kategori komunikasi, permasalahan yang ditemukan pada unsur komunikasi belum terlaksana dengan optimal. Unsur yang terkait dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sosialisasi yang dilaksanakan tidak sesuai pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan oleh kemensos (SOP), masih kurang tepatnya sasaran pada bagi penerima bantuan, yaitu *stakeholder* yang bersangkutan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan masih menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan bantuan PKH untuk kepentingan pribadi. Peneliti memberikan saran pihak kemensos melakukan koordinasi ulang dengan beberapa pihak *stakeholder* yang lain yaitu Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan

Abstract

The Family Hope Program is a conditional assistance program that aims to overcome poverty that occurs in Indonesia, the Family Hope Program has been issued by the government since 2007. However, the implementation of the Family Hope Program still has obstacles and has not been implemented optimally. This study uses a descriptive qualitative approach, in this study to examine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Jambangan District, Surabaya City using the theory proposed by George Edward III. The sampling technique uses observation, interviews, and documentation. The results of this study show that the implementation carried out in the sub-district has not been carried out optimally in the communication category, the problems found in the communication element have not been carried out optimally. Elements related to the implementation of the Family Hope Program (PKH), namely socialization that is carried out not in accordance with the Family Hope Program (PKH)

implementation guidelines issued by the Ministry of Social Affairs (SOP), are still not precisely targeted at the beneficiaries, namely stakeholders concerned about receiving Family Hope Program assistance are still abusing authority by utilizing PKH assistance for personal interests. The researcher advised the Ministry of Social Affairs to re-coordinate with several other stakeholders, namely Districts, Sub-districts, Villages, RTs and RWs to conduct monitoring and evaluation.

Keywords: Family Hope Program, Implementation, Poverty

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang dengan berbagai permasalahan di pemerintahan maupun di masyarakat seperti pendidikan yang rendah, pengangguran, kesenjangan hukum, dan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang menjadi prioritas pembangunan negara (Ferezagia, 2018:2). Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kemiskinan dapat diukur dengan memanfaatkan konsep kemampuan mencukupi kebutuhan dasar (*Basic needs approach*).

Data yang berasal dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwasannya terjadi peningkatan dan penurunan kemiskinan di Indonesia di 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 hingga 2022. Sesuai data tersebut di tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan faktor *covid-19*. Berdasarkan Tabel 1.1 memiliki rerata jumlah penduduk miskin (juta orang) sebesar 26,242 dan rata-rata persentase penduduk miskin mencapai sebesar 9,738. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat dinyatakan sebagai negara miskin. Data yang di himpun dari Kompas.com, pengambilan data jumlah penduduk miskin diperkecil menjadi 6 Provinsi terbesar dengan jumlah penduduk nya di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (Gischa, 2022).

Pengambilan data yang berada di Jawa Timur akan diperkecil ke wilayah Kota Surabaya dari 3 tahun terakhir yakni 2019-2021. Berdasarkan pada tabel 1.3, ada sebesar 130,55 jiwa penduduk miskin di Kota Surabaya tahun 2019, tahun 2020 sebesar 145,67 jiwa, serta di tahun 2021 sebesar 152,49 jiwa. Jumlah penduduk miskin Kota Surabaya, meningkat selama 3 tahun terakhir. Tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 15,12 ribu jiwa, tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,82 ribu jiwa, jika peningkatan diakumulasikan dari tahun 2019 hingga 2021 sebesar 21,94 ribu jiwa.

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial (kemensos) memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan. Program PKH dapat didefinisikan sebagai pemberian bantuan beryarat untuk keluarga maupun seseorang yang kurang mampu, yang termasuk pada daftar data terpadu program penanggulangan kemiskinan. Data akan diolah oleh pusat terkait kesejahteraan sosial, bagi masyarakat yang berhak dan layak menerima bantuan Pogram Keluarga Harapan (PKH), akan ditetapkan sebagai penerima bantuan program PKH (Amaliyyah, 2021:888).

Diterapkannya program PKH, Kebijakan program tersebut juga mengalami perubahan untuk beberapa kali, yakni di tahun 2013 mengalami perubahan dalam bidang pendidikan, yaitu penambahan jenjang pendidikan sampai tingkat SMA. Nominal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengalami peningkatan di setiap

komponen. Tahun 2015, ditambahkan aspek kesejahteraan sosial sehingga terdapat 3 komponen yakni komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Ayuningtias & Dkk, 2018:2).

Wawancara yang sudah dilakukan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan dengan seorang pegawai yang berada di bagian Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kecamatan Jambangan menuturkan, bahwasanya permasalahan yang terjadi yaitu terkait perpindahan tempat tinggal pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan salah sasaran terhadap penerima bantuan program tersebut. Lebih jelasnya, Beberapa warga yang menerima bantuan ini melakukan perpindahan tempat tinggal tanpa melakukan konfirmasi terhadap pihak Kecamatan Jambangan, sehingga dari pihak Kecamatan Jambangan harus menunggu dari penerima program tersebut menghampiri. Karena informasi yang dilakukan oleh pihak instansi jambangan dilakukan secara *door to door* jika penyaluran bantuan ini dapat dicairkan.

Metode

Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, deskriptif dapat didefinisikan sebagai suatu rumusan masalah yang dijadikan sebagai panduan untuk melakukan eksplorasi atau memotret fenomena sosial yang diteliti sehingga pada dasarnya sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu menggunakan fundamental yang bergantung pada pengamatan dan survei.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Murdiyanto, 2020:19) yang bukunya berjudul Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal) menyatakan bahwasannya metodologi kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kaya-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan tingkah laku yang telah diamati. Penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Pada penelitian kualitatif, peneliti dianggap sebagai instrumen kunci. Demikian, peneliti harus mempunyai bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mereka mampu mengajukan pertanyaan, melakukan analisis dan menjelaskan konstruksi obyek yang diteliti. Peneliti harus menitikberatkan pada arti dan terikat nilai.

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan subjek penelitiannya terdapat instrumen kunci atau utama dalam proses kegiatan penelitian. Selanjutnya, hasil dari pendekatan diuraikan dengan kata-kata secara empiris yang disebut deskriptif dan penelitian menekankan kepada generalisasi. Pendekatan kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode yang melukiskan keadaan asli di lapangan dan sesuai dengan kebenaran yang ada. Melalui metode pendekatan kualitatif deskriptif dapat mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Instansi

Kecamatan Jambangan memiliki luas 4,19 Km², memiliki Kepadatan Penduduk yang pada setiap kelurahan yang meliputi 4 kelurahan yakni Kelurahan Jambangan, Karah, Kebonsari, dan Pagesangan. Adapun data kependudukan di setiap kelurahan yang berada di Kecamatan Jambangan sesuai dengan tabel 4.1.

Tabel 4 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jambangan

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jambangan	5,771	5,947	11,718
Karah	7,815	8,008	15,823
Kebonsari	5,678	5,795	11,473
Pagesangan	7,244	7,381	14,625
Total			53,639

(Sumber : Data diolah peneliti, 2023)

Lebih lanjut, berdasarkan tabel 4.1 kecamatan Jambangan memiliki total jumlah penduduk sebesar 11,718 jiwa, kelurahan Karah memiliki total jumlah penduduk sebesar 15,823 jiwa, kelurahan Kebonsari memiliki total jumlah penduduk sebesar 11,473 jiwa, dan kelurahan Pagesangan memiliki total jumlah penduduk sebesar 14,625. Jika keseluruhan jumlah penduduk dari 4 kelurahan ditotalkan sebesar 53,639 jiwa.

Hasil Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dilaksanakan sejak tahun 2007 dan berlangsung hingga sekarang. Berdasarkan Data penerima PKH Tahun 2023 diperoleh data sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Pendidikan Terakhir

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)



Diagram batang tersebut menunjukkan pada pendidikan terakhir bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan di tahun 2023 yang diterangkan sebagai berikut :

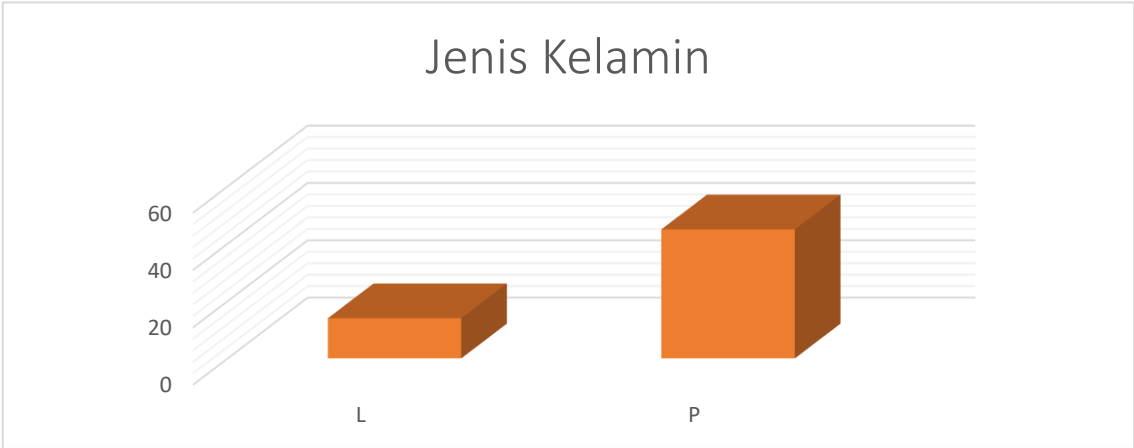
Tabel 4 2 Tingkat Pendidikan Terakhir Penerima PKH

Pendidikan Terakhir	Total Pendidikan Terakhir
Sarjana	2
SD	25
SLTA/Sederajat	4
SMA	12
SMP	16

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan data olah penerima PKH dengan menggunakan indikator tingkat pendidikan terakhir ditemukan data olah pendidikan terendah berada pada pendidikan Sekolah Dasar dengan sejumlah 25 orang. Sedangkan, untuk pendidikan tertinggi Penerima PKH yaitu berada di tingkat pendidikan sarjana dengan sejumlah 2 orang. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa penerima PKH terbesar berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar.

Gambar 4. 2 Jenis Kelamin



(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Diagram batang tersebut menunjukkan pada jenis kelamin bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan di tahun 2023 yang diterangkan sebagai berikut :

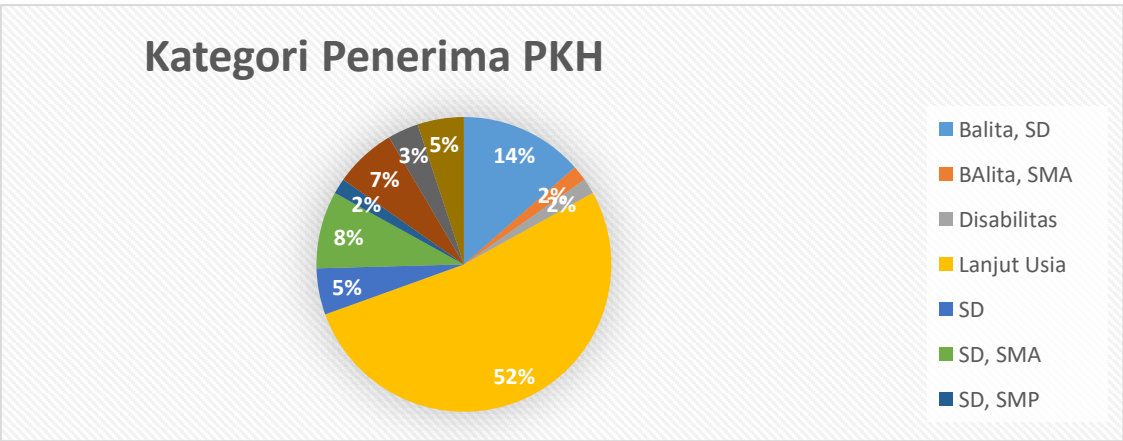
Tabel 4 3 Tingkat Jenis Kelamin Penerima PKH

Jenis Kelamin	Total Jenis Kelamin
L	14
P	45

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan data olah penerima PKH di Kecamatan Jambangan dengan lokus Kelurahan Jambangan terdapat jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 14 orang dan perempuan sebesar 45 orang. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa penerima PKH pada tingkat jenis kelamin yang terbesar berada di jenis kelamin perempuan.

Gambar 4. 3 Kategori PKH



(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Diagram lingkaran tersebut menunjukkan pada Kategori penerima PKH bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan di tahun 2023 yang diterangkan sebagai berikut :

Tabel 4 4 Tingkat Kategori Penerima PKH

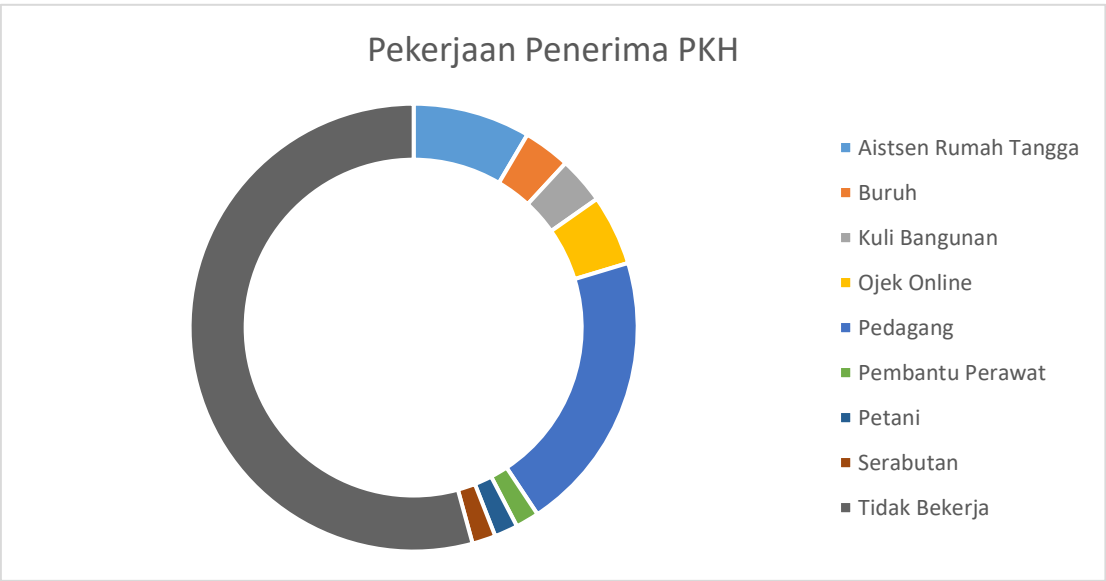
Kategori	Total Kategori
Balita, SD	8
BAlita, SMA	1
Disabilitas	1
Lanjut Usia	31
SD	3
SD, SMA	5
SD, SMP	1
SD, SMP, SMA	4
SMA	2
SMP	3

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan data olah penerima PKH di Kecamatan Jambangan dengan tingkat kategori penerima PKH yaitu penerima PKH kategori sosial sebesar 31 orang yaitu lanjut usia, penerima PKH kategori pendidikan sebesar 23 orang, dan penerima PKH kategori kesehatan sebesar 1 orang. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa penerima PKH pada tingkat kategori yang terbesar berada di kategori Sosial.

Gambar 4. 4 Pekerjaan PKH

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)



Tabel 4 5 Tingkat Pekerjaan Penerima PKH

Pekerjaan	Total Pekerjaan
-----------	-----------------

Aistsen Rumah Tangga	5
Buruh	2
Kuli Bangunan	2
Ojek Online	3
Pedagang	12
Pembantu Perawat	1
Petani	1
Serabutan	1
Tidak Bekerja	32

(Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan data olah penerima PKH di Kecamatan Jambangan dengan tingkat pekerjaan penerima PKH yaitu penerima PKH pada tingkat pekerjaan yang terbesar yaitu tidak bekerja sebesar 32 orang dan yang paling terendah pada tingkat pekerjaan yaitu petani dan serabutan dengan angka masing-masing 1 orang. Hal ini, bisa disimpulkan bahwa penerima PKH pada tingkat pekerjaan yang terbesar berada di tidak bekerja.

Kesimpulan yang dapat diambil dari diagram batang pendidikan terakhir, pada jenjang pendidikan terakhir di Sekolah Dasar yang paling terbanyak yaitu sebesar 25 orang. Dari diagram batang jenis kelamin, pada jenis kelamin perempuan mejadi jenis kelamin terbanyak pada penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebesar 45 orang. Dari diagram lingkaran di kategori penerima bantuan PKH, pada kategori lanjut usia menjadi yang terbanyak dalam penerimaan bantuan PKH. Pada diagram batang tingkat pekerjaan yaitu yang tidak bekerja menjadi yang terbesar.

Hasil pengumpulan data dari implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya berupa data dan informasi yang didapatkan dari observasi, wawancara (dengan pedoman wawancara yang sesuai pada lampiran), dan juga dokumentasi. Berikut adalah hasil wawancara yang meliputi 4 indikator di bawah ini :

1. Komunikasi

Komunikasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan telah dilakukan. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan komunikasi secara transmisi yang dilakukan belum berjalan tidak sesuai aturan yang diberlakukan. Sosialisasi yang kurang menyebabkan beberapa penerima PKH tidak memahami kategori PKH yang mereka dapatkan.

Permasalahan yang terjadi pada implementasi PKH di Kecamatan Jambangan tidak sesuai pada teori kemiskinan yang diterangkan oleh Suparlan (Sriyana, 2021:24) yang pada bukunya berjudul Masalah Sosial menerangkan bahwa kemiskinan merupakan standar rendahnya taraf hidup atau kondisi seseorang atau kelompok yang dikategorikan mengalami kekurangan secara materi yang disandingkan indikator nilai kehidupan secara umum pada lingkungan tersebut.

2. Sumber Daya

Sumberdaya implemntasi PKH sudah terpenuhi dari anggaran, fasilitas dan wewenang. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang dilakukan baik oleh

pihak Kecamatan Jambangan ataupun penerima Program Keluarga Harapan (PKH), keseluruhan masyarakat yang menerima bantuan PKH yang telah diwawancarai menyepakati sesuai pernyataan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Jambangan. Bahwasanya kompetensi yang dimiliki pegawai yang mengurus tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai pada teori yang dikemukakan oleh Tachjan dalam (Sahroji & Dkk, 2022:37) menerangkan bahwa unsur-unsur yang harus terdapat pada implementasi kebijakan di antaranya:

1) Unsur Pelaksanaan

Pada unsur ini, yang menjadi pelaksana kebijakan ialah seluruh pihak yang menjalankan kebijakan. Adapun bentuk pelaksanaan meliputi penentuan sasaran dan tujuan organisasional, analisis dan perumusan kebijakan serta strategi organisasi, pengambilan perencanaan, keputusan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengasapan juga penilaian.

2) Adanya Program yang Dijalankan

Sebuah kebijakan publik pada dasarnya tidak memiliki arti penting dimana terdapat tindakan yang nyata dijalankan melalui beragam kegiatan maupun program yang dimana menjadi rencana komprehensif yang sudah melukiskan sumber daya yang dimanfaatkan dan terdapat pada suatu kesatuan.

3) Target Grup atau Kelompok Sasaran Target

Sekelompok orang maupun organisasi pada masyarakat yang hendak mendapatkan barang maupun jasa dimana dipengaruhi tingkah lakunya dalam kebijakan.

3. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi pada implementor program PKH sudah baik namun masih ditemui kurang optimalnya dalam melakukan kegiatan monev PKH sehingga masih ditemui kesalahan sasaran penerima PKH. Hasil keseluruhan dari wawancara yang telah dilakukan menunjukkan jika di indikator disposisi, sikap yang diberikan implementor program PKH sudah baik namun masih ditemui kurang optimalnya dalam melakukan kegiatan monev PKH sehingga masih ditemui kesalahan sasaran penerima PKH, yaitu dari pihak salah satu RT menerima bantuan PKH yang notabene nya, para implementor tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan PKH yang berbasis untuk masyarakat yang kurang mampu namun tetap sesuai ketentuan atau syarat yang diberlakukan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Struktur Birokrasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan sudah dilakukan dengan dibentuknya implementor PKH ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Hasil wawancara dari keseluruhan informan yang telah dilakukan baik kepada pihak Kecamatan Jambangan ataupun masyarakat, peneliti mengambil kesimpulan dalam struktur birokrasi Kecamatan Jambangan memang sudah terstruktur secara lapangan atau *website* yang mereka sediakan. Saran yang didapatkan dari masyarakat yang menerima program PKH berguna dalam meningkatkan keberlangsungan program tersebut

Penutup**A. KESIMPULAN**

Merujuk kepada analisis data di atas, sehingga kesimpulan pada penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan yang dianalisis dengan teori George Edward terdiri dari empat indikator berikut:

- a. Komunikasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan telah dilakukan. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan komunikasi secara dari indikator kejelasan yang dilakukan belum terpenuhi karena masih ada penerima PKH yang baru belum memahami terkait PKH, selain itu masih ditemui rekapitulasi data yang belum lengkap di tingkat Kecamatan.
- b. Sumberdaya dari segi fasilitas belum terpenuhi karena mengalami penurunan untuk anggaran sosialisasi.
- c. Disposisi pada implementor program PKH sudah baik namun masih ditemui kurang optimalnya dalam melakukan kegiatan monev PKH sehingga masih ditemui kesalahan sasaran penerima PKH,
- d. Struktur Birokrasi pada implementasi program PKH sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan sudah dilakukan dengan dibentuknya implementor PKH ditingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT.

SARAN

Merujuk pada hasil penelitian di atas, saran dari peneliti terkait implementasi program PKH sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Jambangan sebagai berikut :

1. Memberikan sosialisasi khusus nya kepada penerima bantuan PKH yang baru sehingga mereka mendapatkan pemahaman dan kejelasan terkait dengan bantuan PKH.
2. Melengkapi data penerima PKH di data rekap penerima PKH kecamatan Jambangan yang meliputi data tingkatan pendidikan akhir, kategori penerima Program Keluarga Harapan, jenis kelamin dan pekerjaan bagi penerima bantuan, yang bertujuan untuk memudahkan informasi dan rekapitulasi data sehingga perlu melakukan koordinasi ulang pada setiap bulan nya dengan pihak pendamping, koordinasi nya berupa tindakan pendataan nama-nama dengan beberapa memasukkan tingkatan pendidikan penerima PKH, pekerjaan, jenis kelamin dan kategori penerima PKH.
3. Menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan sosialisasi PKH.
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala untuk update penerima data PKH.

Referensi

- Abdulah, & Dkk. (2022). Tahapan pembuatan kebijakan publik sebagai landasan pengambil kebijaksanaan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 7(1), 148–155.
- Adhilla, A. N., & Dkk. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Timur Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1002. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1002-1017>
- Adhitya, B., & Dkk. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Akhmad. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 10–15.
- Amaliyyah, R. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA PADA ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU*. 2(February), 6.
- Ardiyanto, A. F., & Dkk. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Bidang Pendidikan). *Publika*, 13–24. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p13-24>
- Ayuningtias, D., & Dkk. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Ngepung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. *Publika*. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23500>
- Daud, M., & Dkk. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51>
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2018). *KEBIJAKAN PUBLIK* (Cet. 2). CV. PUSTAKA SETIA.
- Elia, F. A. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 15–42. <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/152>
- Feby, F. P. (2021). Kemiskinan Perdesaan di Kabupaten Wonosobo (Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo). *Journal of Politic and Government Studies*, 11(1), 65–80. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/32665/26211>
- Ferezagia, D. V. (2018). Data Baru BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1–6.
- Firdaus, W. Y. (2023). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1151–1157.
- Gischa, S. (2022). 6 Provinsi di Pulau Jawa. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/26/160000669/6-provinsi-di-pulau-jawa?page=all>

- Gunarsa, M. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Di Kecamatan Cibadak). *Ummi*, 97–102. <https://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/ummi/article/view/535%0Ahttps://www.jurnal.ummi.ac.id/index.php/ummi/article/download/535/240>
- Heliani, & Dkk. (2023). *OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN SEBAGAI*. 2(1), 1–7.
- Kementerian Sosial. (2021). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021. In *Kementerian Sosial Republik Indonesia* (p. 76).
- Latif, N. (2018). *EKONOMI ISLAM SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI TAUHID UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL MAKMUR*. 1–11.
- Mamonto, N., & Dkk. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950>
- Manongga, A., & Dkk. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
- Masdar, A. M. I. R., & Dkk. (2022). Kajian Strategi Kebijakan Publik Provinsi Aceh Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Merawat Perdamaian Masa Depan. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(10), 3651. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Murdiyanto, D. E. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)* (ed. I). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nizar, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017. *Jurnal Sikap (Solusi Ilmiah Kebijakan Administrasi Publik*, 3, 50–60. <http://ejournal.unwmataaram.ac.id/sikap/article/view/396>
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>
- Putranto, A. T., & Dkk. (2020). Jurnal Disrupsi Bisnis. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 1(2), 172.
- Sahroji, Q. N., & Dkk. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 7(1), 34–39.
- Salman, R. (2018). Problematika Kemiskinan. *Universitas Islam Riau*, 7, 40.
- Samion, & Dkk. (2019). Implementasi Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat Studi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Skala Kecil Di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. *Jurnal Paradigma (JP)*, 8(1), 44. <https://doi.org/10.30872/jp.v8i1.2926>
- Sekretaris Negara RI. (2004). UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jdih BPK RI*, 1–45.
- Sopah, F., & Dkk. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO*. 21(1), 1–9. <http://journal.um->

surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203

- Sriyana, S.Sos., M. S. (2021). *MASALAH SOSIAL Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial* (M. S. Dr. Effrata (ed.); Cet 1). CV Literasi Nusantara Abadi.
- Supriyadi, : Dr. A. Adang. (2019). *Airmanship*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wajdi, F. (2021). *HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK* (Cetakan Pe). Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan publik : teori, proses, dan studi kasus* (Cet.2, Ed.). CAPS.
- Wulandari, S., & Dkk. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 1–10.
- Yulita, & Dkk. (2019). MODEL STRATEGI MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK SEKTOR PASAR TRADISIONAL UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 37–45. <https://doi.org/10.2150/jiej.96.498>